

BAB IV

GAMBARAN UMUM

A. Gambaran Umum Wilayah Penelitian

1. Batas Administrasi

Daerah Provinsi Jawa Barat terletak di pulau Jawa bagian Barat, di bagian selatan dibatasi lautan Indonesia, sedangkan di bagian lainnya dibatasi oleh wilayah provinsi lainnya yang meliputi:

- a. Sebelah Barat, berbatasan dengan Provinsi Banten
- b. Sebelah Timur, berbatasan dengan Provinsi Jawa Tengah
- c. Sebelah Utara, berbatasan dengan Provinsi DKI Jakarta
- d. Sebelah Selatan, berbatasan dengan Samudra Indonesia

Secara administrasi jumlah kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Barat berjumlah 27 kabupaten atau kota meliputi 18 kabupaten dan 9 kota serta terdiri dari 626 kecamatan, 645 kelurahan dan 5.312 desa. Badan Koordinasi Pemerintah Pembangunan (BKPP) terdapat system pembagian dalam 4 wilayah sebagai berikut:

- 1) Wilayah I Bogor meliputi Kabupaten Bogor, Kota Bogor, Kota Depok, Kabupaten Sukabumi, Kota Sukabumi, dan Kabupaten Cianjur.

- 2) Wilayah II Purwakarta meliputi Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Suabang, Kabupaten Karawang, Kabupaten Bekasi, dan Kota Bekasi.
 - 3) Wilayah III Cirebon meliputi Kabupaten Cirebon, Kota Cirebon, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Majalengka, dan Kabupaten Kuningan.
 - 4) Wilayah IV Priangan meliputi Kabupaten Bandung, Kota Bandung, Kota Cimahi, Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Sumedang, Kabupaten Garut, Kabupaten Pangandaran, Kabupaten Tasikmalaya, Kota Tasikmalaya, Kabupaten Ciamis, dan Kota Banjar.
2. Luas Wilayah

Provinsi Jawa Barat secara geografis terletak di antara 5°50' – 7°50' Lintang Selatan dan 104°48' – 108°48' Bujur Timur, dengan luas wilayah daratan Jawa Barat 35.222,18 Km². Provinsi Jawa Barat memiliki kondisi alam dengan struktur geologi yang kompleks dengan wilayah pegunungan berada di bagian tengah serta bagian selatan dan utara wilayah dataran rendah. Provinsi Jawa Barat memiliki kawasan hutan dengan fungsi hutan konservasi, hutan lindung dan hutan produksi yang luasnya mencapai 22,10% dari luas Provinsi Jawa Barat. Curah hujan berkisar 2000-4000 mm/th dengan tingkat curah

hujan tinggi, memiliki 40 daerah aliran sungai dengan debit permukaan air 81 milyar m³/th dan air tanah 150 juta m³/th.

3. Iklim

Provinsi Jawa Barat memiliki iklim tropis, dengan suhu 9°C di Puncak Gunung Pangrango di Pantai Utara. Curah hujan Provinsi Jawa Barat rata-rata mencapai 2000 mm per tahun, namun terdapat di beberapa wilayah di daerah pegunungan curah hujan rata-rata mencapai 3000 sampai 5000 mm per tahun.



Gambar 4.1

Peta Provinsi Jawa Barat

4. Kependudukan

Berdasarkan sensus penduduk tahun 2015, jumlah penduduk Provinsi Jawa Barat tercatat sebesar 43.053.732 jiwa. Yang mencakup mereka yang bertempat tinggal di daerah perkotaan sebanyak 65,69 persen dan di daerah pedesaan sebanyak 34,31 persen.

Menurut kelompok jenis kelamin, Jawa Barat memiliki jumlah penduduk laki-laki sebanyak 21.907.040 jiwa dan perempuan sebanyak 21.146.692 jiwa dengan seks ratio 104%, berarti terdapat 104 laki-laki untuk setiap 100 perempuan. Menurut kelompok umur, jumlah kelompok umur 0-4 tahun adalah populasi yang tinggi di tanah Jawa Barat dengan jenis kelamin laki-laki 2,2 juta jiwa dan perempuan 2,1 juta jiwa.

Rasio ketergantungan penduduk Jawa Barat adalah 51,20%. Angka ini menunjukkan bahwa setiap 100 orang usia produktif (15-64 tahun) terdapat sekitar 51 orang usia tidak produktif (0-14 dan 65+ tahun), yang menunjukkan banyaknya beban tanggungan penduduk suatu wilayah. Rasio ketergantungan di wilayah perkotaan adalah 44,08% sementara di wilayah pedesaan 55,92%.

5. Pertumbuhan Ekonomi

Menurut Bank Indonesia, perekonomian Jawa Barat pada triwulan III 2019 tumbuh sebesar 5,14% melambat dibandingkan pertumbuhan triwulan II 2019 yang mencapai 5,70%. Perlambatan ekonomi Jawa Barat triwulan III 2019 disebabkan oleh konsumsi setelah berlalunya bulan Ramadhan dan Idul Fitri serta Pilpres dan Pileg serentak. Kondisi ini dapat dilihat dari melambatnya konsumsi rumah tangga dan penurunan konsumsi Lembaga Non Pemerintah Penyedia Rumah Tangga (LNPRP). Ketidakpastian kondisi ekonomi global yang meningkat juga berkontribusi menahan laju pertumbuhan ekonomi

Jawa Barat dengan melemahnya investasi yang selama ini didominasi *Foreign Direct Investment*.

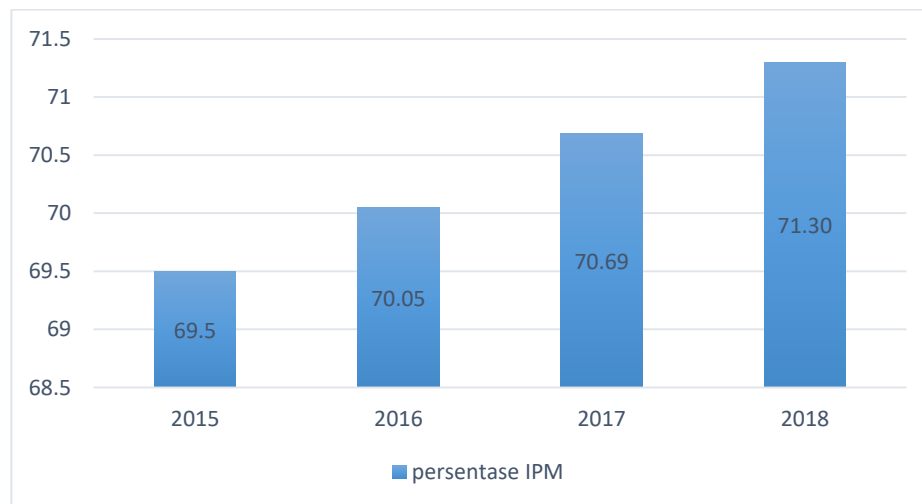
Sementara dari sisi lapangan usaha, musim kemarau yang panjang berlangsung hingga oktober 2019 dapat menyebabkan kekeringan di sebagian wilayah Jawa Barat yang berakibatkan tingginya gagal panen, sehingga terjadinya penurunan kinerja lapangan usaha pertanian. Perlambatan pertumbuhan ekonomi Jawa Barat pada triwulan III 2019 juga disebabkan oleh perlambatan kinerja lapangan usaha perdagangan dan eceran. Dengan melihat perkembangan kondisi perekonomian global dan domestik saat ini, pertumbuhan ekonomi Jawa Barat pada triwulan IV 2019 diperkirakan sedikit meningkat dibandingkan dengan triwulan III 2019, yaitu pada kisaran 5,2% - 5,6%.

B. Perkembangan Variabel Penelitian

1. Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Provinsi Jawa Barat

Pembangunan manusia menjadi faktor utama dalam pembangunan sosial ekonomi di suatu daerah maupun nasional. Dalam lingkup daerah maupun nasional Pemerintah Republik Indonesia sangat aktif dalam melaksanakan program pembangunan yang menyangkut pembiayaan untuk mengangkat kondisi sosial ekonomi masyarakat khususnya yang memiliki pendapatan rendah. Program yang bersifat intervensi sangat diperlukan mengingat terbatasnya akses penduduk

miskin terhadap faktor produksi maupun layanan pendidikan dan kesehatan. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan pengukuran perbandingan dari harapan hidup, pendidikan dan standar hidup untuk semua Negara. IPM digunakan sebagai indikator untuk menilai aspek kualitas dari pembangunan dan untuk mengklarifikasikan apakah sebuah negara termasuk negara maju, negara berkembang atau negara terbelakang dan juga untuk mengukur pengaruh dari kebijakan ekonomi terhadap kualitas hidup. Berdasarkan data yang bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa Barat, dibawah ini merupakan perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Provinsi Jawa Barat sebagai berikut:



GAMBAR 4.2

Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Provinsi Jawa Barat Tahun 2015-2018 (dalam indeks)

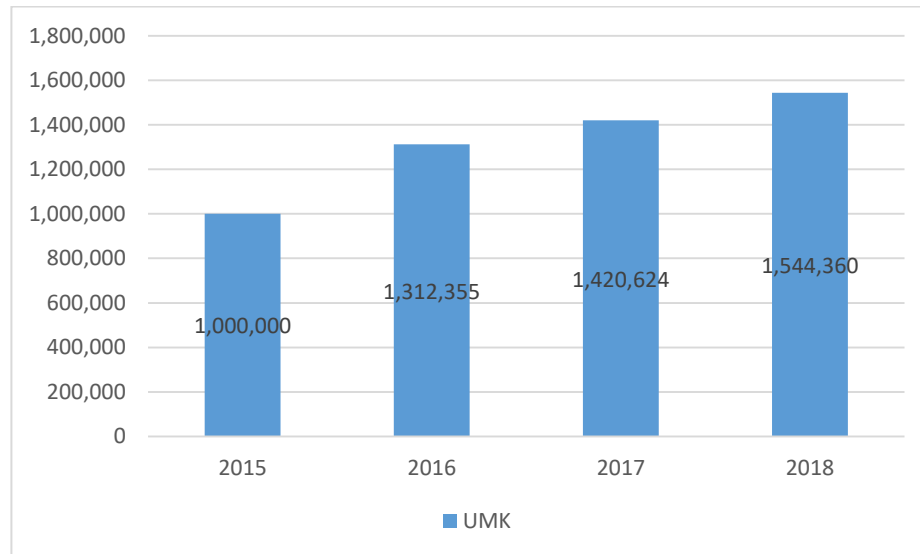
Berdasarkan gambar 4.2 dapat dijelaskan bahwa perkembangan angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sejak tahun 2015-2018,

mengalami kemajuan yang telah di capai oleh Provinsi Jawa Barat dalam pembangunan manusia cukup signifikan. Angka Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Jawa Barat mengalami peningkatan yang cukup berarti dari 69,50 pada tahun 2015 pada tahun 2016 mengalami peningkatan menjadi 70,05 dan terus meningkat menjadi 70,69 pada tahun 2017, hingga tahun 2018 IPM Provinsi Jawa Barat terus mengalami peningkatan menjadi 71,30.

2. Perkembangan Upah Minimum Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat

Upah minimum kabupaten merupakan upah minimum yang setiap tahunnya berubah mengalami kenaikan, berdasarkan peraturan yang telah di buat oleh gubernur pada tiap provinsi. Penetapan upah minimum kabupaten/kota untuk menetapkan formula upah yang realistis, sesuai dengan kondisi daerah dan kemampuan perusahaan. Penetapan Upah Minimum di setiap kabupaten/kota merupakan upaya pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya pekerja agar mendorong peningkatan produktifitas (Merdekawaty dan Ispriyanti, 2016). Hal ini terbukti kerana terjadi kenaikan pada kualitas kesejahteraan masyarakat. Penetapan jumlah upah minimum supaya buruh atau para pekerja dapat memenuhi kebutuhan hidupnya secara minimal yaitu kebutuhan sandang, pangan dan papan keperluan rumah tangga. Dari peningkatan upah tersebut yang diterima oleh para buruh

dapat meningkatkan daya beli masyarakat sehingga dampaknya akan terjadi pada peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Berdasarkan peraturan Gubernur Jawa Barat setiap tahun didapatkan Upah Minimum Kabupaten/Kota yang terlihat pada grafik berikut:



GAMBAR 4.3

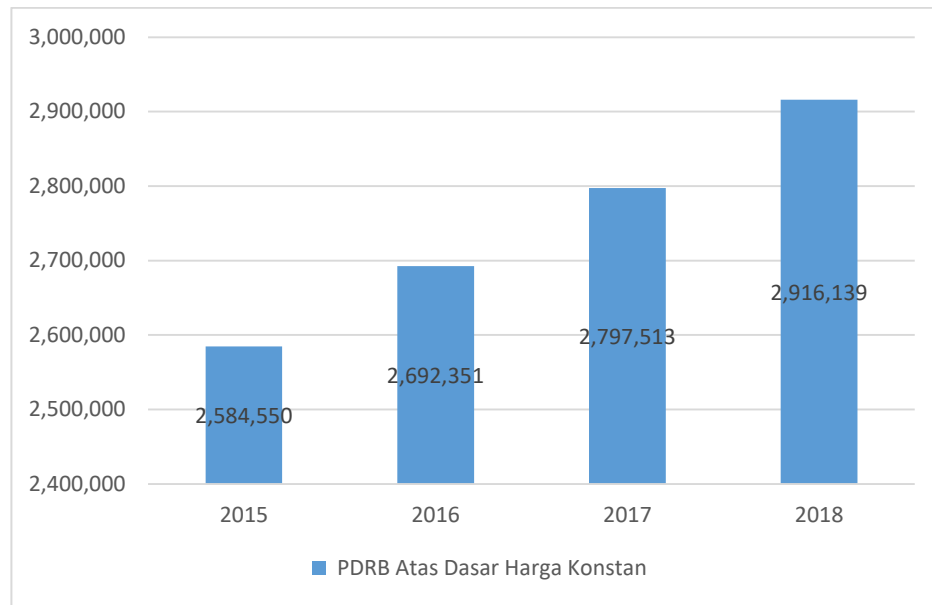
**Perkembangan Upah Minimum di Provinsi Jawa Barat
Tahun 2015-2018 (juta rupiah)**

Berdasarkan Gambar 4.3 bahwa perkembangan Upah Minimum di Provinsi Jawa Barat setiap tahunnya mengalami kenaikan. Upah Minimum Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat pada tahun 2015 sebesar Rp. 1.000.000, pada tahun 2016 mengalami peningkatan sebesar Rp. 1.312.355, pada tahun 2017 upah minimum kabupaten mengalami peningkatan kembali sebesar Rp. 1.420.624, kemudian pada tahun 2018 upah minimum kabupaten kembali mengalami peningkatan sebesar Rp. 1.544.360. Hal tersebut membuktikan bahwa

Provinsi Jawa Barat sedang dalam proses pembangunan untuk mensejahterakan masyarakat. Diharapkan dengan tingginya tingkat upah dapat menyeimbangkan dengan pembangunan manusianya.

3. Perkembangan Produk Domestik Bruto (PDRB) di Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu indikator yang dapat menggambarkan tingkat pertumbuhan ekonomi. Laju pertumbuhan ekonomi biasanya dapat digunakan untuk menilai seberapa besar keberhasilan pembangunan suatu daerah dalam periode waktu yang tertentu dan menjadi tolak ukur dalam menentukan arah kebijakan pembangunan mendatang (Diastama dkk., 2018). PDRB juga dapat digunakan untuk mengetahui perubahan harga dengan menghitung deflator PDRB (perubahan indeks implisit). Indeks harga implisit merupakan rasio antara PDRB menurut harga konstan dan PDRB menurut harga berlaku. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi dapat mengubah pola konsumsi karena peningkatan daya beli. Tingginya daya beli masyarakat merupakan salah satu indikator komposit dalam IPM yang yang disebut indikator pendapatan. Di bawah ini merupakan tabel dan gambar perkembangan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Provinsi Jawa Barat sebagai berikut:



GAMBAR 4.4

Perkembangan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 di Provinsi Jawa Barat

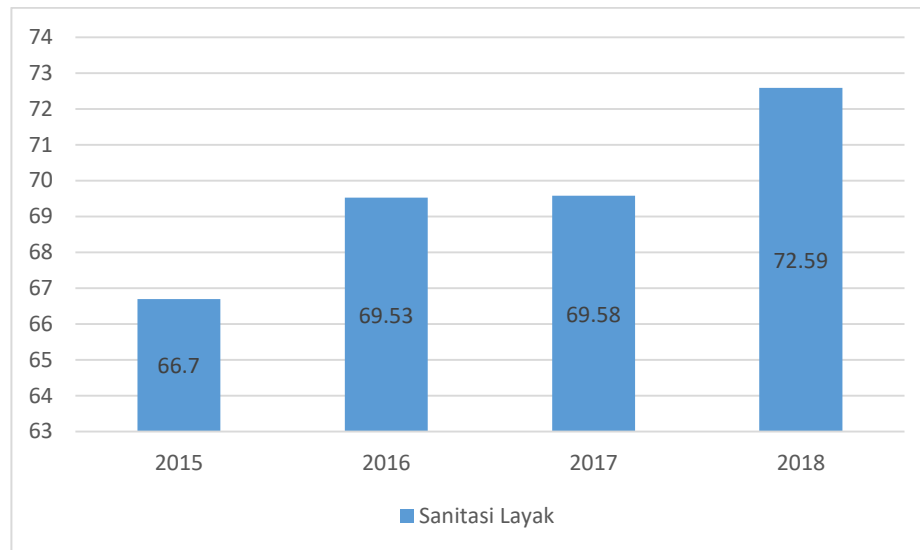
Tahun 2015-2018 (juta rupiah)

Menurut Gambar 4.4 diatas menunjukkan bahwa perkembangan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat setiap tahunnya terus mengalami peningkatan yang signifikan, seperti yang dilihat dari gambar di atas pada tahun 2015 sebesar 2.584.550 juta rupiah, pada tahun 2016 mengalami kenaikan sebesar 2.692.351 juta rupiah, pada tahun 2017 mengalami kenaikan kembali sebesar 2.797.513 juta rupiah dan mengalami kenaikan kembali pada tahun 2018 sebesar 2.916.139 juta rupiah. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) mempunyai peran penting dalam finansial suatu daerah karena PDRB bisa dijadikan untuk tolak ukur kesejahteraan suatu

daerah, dengan kesejahteraan yang tinggi maka kualitas hidup masyarakat juga dapat menjadi lebih baik.

4. Perkembangan Akses Sanitasi Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat

Derajat kesehatan yang tinggi harus didukung dengan fasilitas kesehatan dan sanitasi yang baik. Pembangunan sanitasi dapat dibagi menjadi tiga bidang yaitu pembangunan bidang pengelolaan persampahan, pengelolaan air limbah dan saluran pembuangan. Pembangunan ketiga bidang sanitasi tersebut merupakan upaya untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dan lingkungan (Soeranto, 2004). Yang termasuk dalam indikator keberhasilannya selalu diukur dari indeks Tingkat Harapan Hidup, Tingkat Kematian Bayi, dan Angka Penyakit yang disebabkan oleh air contohnya demam berdarah, diare dan tifus. Dalam meningkatkan upaya pembangunan sanitasi dapat meningkatkan kesehatan masyarakat dan lingkungan. Keberhasilan dari hal tersebut dapat diukur dari salah satu indikator IPM yaitu angka harapan hidup. Tetapi Indonesia selalu minim dalam pendapatan masyarakat yang digunakan untuk pembangunan sanitasi layak. Dibawah ini merupakan tabel dan gambar perkembangan Akses Sanitasi Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat sebagai berikut:



GAMBAR 4.5

Perkembangan Rumah Tangga Yang Memiliki Akses Sanitasi Layak di Provinsi Jawa Barat

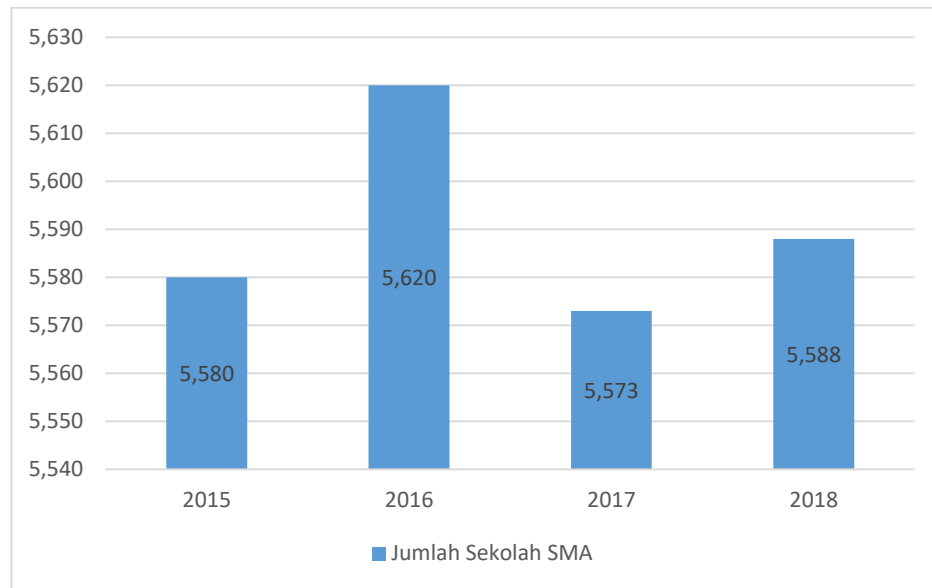
Tahun 2015-2018 (dalam persen)

Menurut Gambar 4.5 menunjukkan bahwa tingkat perkembangan Rumah tangga yang memiliki akses sanitasi layak kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat setiap tahunnya mengalami peningkatan yang signifikan, seperti yang dilihat pada gambar di atas pada tahun 2015 menunjukkan sebanyak 66,70 persen, pada tahun 2016 mengalami kenaikan menjadi 69,53 persen, pada tahun 2017 sedikit mengalami kenaikan menjadi 69,58 kemudian pada tahun 2018 Rumah Tangga yang memiliki akses Sanitasi Layak mengalami kenaikan kembali menjadi 72,59. Maka dalam meningkatkan upaya pembangunan sanitasi dapat meningkatkan kesehatan masyarakat dan lingkungan.

5. Perkembangan Jumlah Sekolah SMA Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat

Berdasarkan pada Undang-Undang No.2 tahun 1989 sekolah merupakan satuan pendidikan yang berjenjang dan berkesinambungan untuk menyelenggarakan kegiatan belajar mengajar. Sekolah merupakan suatu lembaga untuk belajar seperti membaca, menulis dan belajar untuk berperilaku yang baik. Sekolah juga merupakan bagian dari integral dari suatu masyarakat yang berhadapan dengan kondisi nyata yang terdapat dalam masyarakat pada masa sekarang. Sekolah juga merupakan lingkungan kedua tempat anak-anak berlatih dan menumbuhkan kepribadiannya yang bersifat aktif dan kreatif artinya sekolah dapat menghasilkan sesuatu yang bermanfaat bagi masyarakat dalam hal ini adalah orang-orang yang terdidik (Pauziah, 2017).

Populasi yang digunakan adalah penduduk yang berumur 15 tahun keatas karena pada kenyataannya penduduk usia tersebut sudah ada yang berhenti sekolah. Batasan tersebut diperlukan supaya angkanya lebih mencerminkan kondisi yang sebenarnya mengingat penduduk yang berusia kurang dari 15 tahun masih dalam proses sekolah. Lit merupakan populasi penduduk yang memiliki kemampuan baca tulis dalam suatu kelompok penduduk secara keseluruhan sedangkan angka MYS mencerminkan gambaran terhadap keterampilan. Di bawah ini merupakan tabel dan gambar perkembangan Jumlah Sekolah SMA Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat sebagai berikut:



GAMBAR 4.6

Perkembangan Jumlah Sekolah Tingkat SMA di Provinsi Jawa Barat Tahun 2015-2018 (dalam unit)

Berdasarkan Gambar 4.6 menunjukkan Jumlah Sekolah Tingkat Menengah Atas baik yang sekolah negeri maupun swasta di kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat, dari tahun 2015-2018 jumlah sekolah di Provinsi Jawa Barat mengalami interval (naik turun). Seperti yang dilihat dari gambar di atas pada tahun 2015 jumlah sekolah sebanyak 5.580 unit, pada tahun 2016 jumlah sekolah mengalami kenaikan menjadi 5.620 unit, namun pada tahun 2017 jumlah sekolah mengalami penurunan menjadi 5.573 unit dan pada tahun 2018 jumlah sekolah mengalami kenaikan kembali menjadi 5.588 unit.

Pada penjelasan diatas pemerintah dapat mengoptimalkan kembali kinerjanya dalam menambah jumlah sekolah untuk pendidikan

masyarakat yang tinggi. Karena dari pendidikan yang baik dapat menciptakan masyarakat yang baik dan dapat menciptakan generasi yang mempunyai intelektual yang tinggi di kemudian hari.